

Ratusan Miliar Dianggarkan untuk Atasi Stunting

▶ Program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman berjalan dengan baik.

▶ Pemkab Gunungkidul menaikkan alokasi anggaran di APBD 2025 untuk penanganan *stunting* hingga Rp3 miliar.

SLEMAN—Pemerintah daerah di DIY menganggarkan ratusan miliar untuk mengatasi masalah tengkes atau *stunting* di Bumi Mataram.

David Kurniawan, Alfi Annissa Karin, & Andreas Yuda Pramono
redaksi@harianjogja.com

PROGRAM

PENURUNAN STUNTING



Pemerintah menargetkan penurunan prevalensi *stunting* menjadi 14% pada akhir 2024, dengan terus melakukan intervensi untuk mempersiapkan generasi Emas 2045. *Stunting* adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kurang gizi kronis terutama pada 1.000 hari pertama kehidupan.

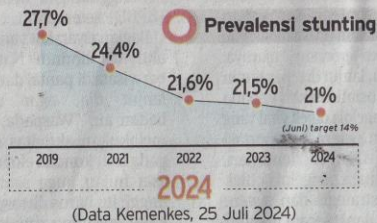
Sekretaris Tim Percepatan Penanganan Stunting (TPPS) Kabupaten Sleman, Wildan Solichin, menjelaskan penanggulangan *stunting* ada empat sasaran, yakni, pencegahan bagi calon pengantin, ibu hamil, bayi dua tahun (baduta) dan anak di bawah lima tahun (balita).

Di setiap sasaran, ia mengakui ada program yang dilaksanakan. Sebagai contoh, untuk calon pengantin ada pengukuran lingkaran dengan kategori normal

23,5 sentimeter hingga memastikan tidak terjadi kekurangan darah atau anemia. "Ya kalau kurang, maka sebelum menikah ada program seperti pemberian tablet tambah darah serta upaya memenuhi gizi yang baik," katanya.

Hal yang sama juga berlaku bagi ibu hamil, anak baduta maupun anak balita. Proses pengecekan rutin menjadi kunci dalam upaya pencegahan *stunting*.

PROYEKSI
2025



- Memberikan makanan tambahan untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan anak usia <2 tahun.
- Meningkatkan pemeriksaan kesehatan di posyandu dan puskesmas, seperti skrining anemia pada ibu hamil dan memantau pertumbuhan balita.
- Mendorong pemberian ASI eksklusif dan makanan pendamping ASI kaya protein.
- Memperbaiki sanitasi dan akses air bersih guna mencegah penyakit.
- Mengedukasi masyarakat tentang dampak *stunting* dan pencegahannya.

▶ Halaman 11

Grafis: Harian Jogja/Tri H | Sumber: Kemenkes (Antara)



“Ada pemberian makanan tambahan untuk memenuhi asupan gizi sehingga tidak terjadi stunting dan lain sebagainya. Intinya, kami secara bersama-sama lintas OPD di lingkup Pemkab terus melakukan upaya pencegahan *stunting*,” katanya.

Menurut dia, program penanggulangan *stunting* di Kabupaten Sleman berjalan dengan baik. Sebagai contoh, di 2022 *stunting* di Sleman sebesar 6,88%, turun 2,37% menjadi 4,51% di 2023. Adapun angka *stunting* di 2024 kembali turun, meski hanya tipis dan tidak sampai satu persen. “Saat ini angka *stunting*nya 4,41 persen atau turun 0,1 persen ketimbang capaian di 2023,” kata Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) ini.

Angka tersebut di bawah rata-rata nasional yang masih di atas 10% pada tahun ini. Prevalensi *stunting* secara nasional tercatat pada 2021 sebesar 24,4%, kemudian 2022 turun menjadi 21,6%, turun tipis pada 2023 sebesar 21,5% dan pada tahun ini ditargetkan menjadi 14%.

Pada tahun ini disediakan dana sebesar Rp112 miliar. Angka ini merupakan akumulasi dan berada di lintas OPD di lingkup Pemkab Sleman. “Memang penanganannya lintas sektor dengan melibatkan semua OPD. Misalnya, DPUPKP Sleman juga ada alokasi, untuk menangani masalah penyediaan air bersih dan sanitasi,” katanya.

Adapun untuk 2025, Wildan mengatakan Pemkab Sleman mengalokasikan anggaran sekitar Rp130-an miliar guna menangani masalah *stunting*. “Pemkab tetap fokus menurunkan *stunting*. Untuk targetnya, bisa turun seperti tahun ini sudah bagus karena angka yang semakin kecil, maka penanganan juga semakin sulit. Wong di Amerika Serikat yang merupakan negara maju, juga masih ada *stunting* di kisaran tiga persen,” katanya.

Terpisah, Sekretaris Daerah Sleman, Susmiarto mengatakan, untuk pelaksanaan makan siang gratis, hingga saat ini masih menunggu petunjuk teknis

dari Pemerintah Pusat. Meski demikian, ia mengakui sudah mengalokasikan anggaran untuk menjalankan program tersebut.

Menurut Susmiarto, sesuai ketentuan dari Pemerintah Pusat, Pemkab Sleman wajib mengalokasikan anggaran sebesar Rp115 miliar di 2024. Pagu ini coba dipenuhi, namun hingga Rancangan APBD 2025 disepakati bersama dengan DPRD, anggaran yang dikumpulkan baru sebesar Rp105,4 miliar.

Anggaran Meningkat

Pemkab Gunungkidul menaikkan alokasi anggaran di APBD 2025 untuk penanganan *stunting* hingga Rp3 miliar. Naiknya alokasi anggaran tersebut Pemkab harapkan dapat menurunkan angka *stunting* hingga 13%.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Gunungkidul, Mohamad Arif Aldian, mengatakan sumber pendanaan penanganan *stunting* terbagi menjadi dua, APBD dan non-APBD.

Pada APBD 2024 Pemkab mengalokasikan Rp42,6 miliar dan 2025 sebesar Rp45,6 miliar. Ada kenaikan Rp3 miliar. Adapun sumber non-APBD mencakup Dana Alokasi Khusus (DAK), APBN, Dana Keistimewaan 2024 sebesar Rp10,6 miliar dan 2025 sebesar Rp12,8 miliar. Ada kenaikan Rp2,2 miliar.

Dengan begitu total alokasi penanganan *stunting* di Gunungkidul pada 2024 mencapai Rp53,2 miliar dan 2025 menyentuh Rp58,5 miliar.

Dari alokasi tersebut, Pemkab Gunungkidul menargetkan angka *stunting* turun di angka 13% pada 2025. Adapun angka *stunting* sejak 2021 hingga 2024 secara berurutan, yaitu 20,6%; 23,5%; 22,2%; dan 14,37%.

Disinggung ihwal proyeksi *stunting* tahun depan dengan mempertimbangkan dampak program Makan Bergizi Gratis, Arif mengaku belum dapat menyampaikannya. Ia masih menunggu petunjuk teknis pelaksanaan program tersebut.

“Kami harap angka *stunting* turun menjadi 13 persen tahun depan dengan keterlibatan semua *stakeholder* dalam aksi konvergensi dan inovasi baik

melalui dukungan alokasi anggaran dari APBD, APBD DIY, APBN maupun sumber pembiayaan nonpemerintah untuk intervensi sensitif, intervensi spesifik maupun koordinatif.”

Lampau Nasional

Sementara itu, Kabid Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Jogja, Aan Iswanti, mencatat angka *stunting* di Kota Jogja hingga November mencapai 11,18%. Angka ini berada di bawah target yang dipasang sepanjang 2024 yakni sebesar 12%. Sementara pada 2023, prevalensi *stunting* mencapai 11,8%. Artinya, angka *stunting* di Kota Jogja hingga akhir November 2024 ini masih lebih rendah jika dibanding tahun lalu. Aan menjelaskan berbagai upaya dilakukan untuk menekan angka prevalensi *stunting*. Tak hanya pada anak balita saja, upaya intervensi ini ditempuh dengan menasar pada segala usia. Mulai dari remaja, ibu hamil, hingga anak di bawah dua tahun.

Ia menjelaskan sejauh ini Dinkes Kota Jogja telah menggalakkan program Aksi Bergizi. Lewat program ini, Dinkes mencoba mencegah *stunting* dengan masuk ke tingkat sekolah. Aksi Bergizi mengajak siswa untuk melakukan aktivitas fisik bersama-sama. Setelah itu, siswa menyantap sarapan pagi dengan menu yang bergizi.

Selain itu, Dinkes Kota Jogja juga memberikan makanan tambahan. Tahun ini bahkan anggaran untuk pemberian makanan tambahan mencapai Rp3,2 miliar. Aan menjelaskan makanan tambahan tak hanya diberikan kepada anak balita yang mengalami gejala *stunting*. Namun, juga bagi ibu hamil dengan kurang energi kronik.

Adapun, Pemkab Kulonprogo mencatat prevalensi *stunting* di wilayahnya sebesar 10,48% per Juni kemarin. Kepala Dinkes Kulonprogo, Sri Budi Utami menyebut salah satu upaya itu dengan menggandeng swasta untuk turut membantu.

Meski demikian, angka *stunting* di Kota Jogja dan Kabupaten Kulonprogo masih lebih baik daripada rata-rata nasional.

(Triyo Handoko)